PROSIDING
SENALA
Seminar Nasional
Linguistik Indonesia



Available online:
https://senala.upnjatim.ac.id
E-ISSN:
3123-335X
Prodi Linguistik Indonesia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Submitted: 07/10/2026 Accepted: 01/11/2026 Published: 05/11/2026

Research Article

Representasi Aktor dalam Pemberitaan Karhutla Kalimantan pada Website Kementerian Kehutanan Tahun 2026: Kajian Ekolinguistik

Dewi Herlina*[1], Nur Santriani Utari Azim[2]
[1,2] *Magister Linguistik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*
*Correspondence Author, E-mail: dewiherlina@mail.ugm.ac.id

Abstract

Background: Forest and land fires in Kalimantan have become one of the environmental issues receiving serious attention, both nationally and internationally. As the institution responsible for controlling Karhutla, the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia plays a crucial role in disseminating information about these incidents. Purpose: Therefore, it is worthwhile to study coverage of Karhutla on the Ministry of Forestry's official website. Methods: This study employs a mixed-methods approach. The data were drawn from eight news articles on forest and land fires published on the Ministry of Forestry's official website. Data analysis drew upon van Leeuwen's (2008) theory of social actor representation and Stibbe's (2015) theory of ecolinguistics. Results: Research findings indicate two dominant actors in managing forest and land fires: the public and the government. The public is portrayed ambivalently, simultaneously as participants in fire control efforts and as parties potentially responsible for environmental damage. The government is depicted as the primary actor, responsive and swift in handling these fires, reflecting a pro-government ideology within the Ministry of Forestry's discourse. From an ecolinguistic perspective, these findings indicate that language choices in news reporting construct ecological stories (stories we live by) about human responsibility, institutional roles, and environmental protection, while highlighting the limited attention given to ecosystem conditions and long-term ecological impacts. Conclusion: This study's findings are expected to enrich the discussion of ecolinguistics in Indonesian government media.

Keywords: corpus, critical discourse analysis, ecolinguistics, forest and land fires

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang memiliki dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Karhutla memiliki dampak multidimensional, tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya menurunnya kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat, di sektor pendidikan, karhutla memaksa sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Kabut asap membatasi berbagai kegiatan masyarakat di luar rumah. Selain itu, aktivitas penerbangan juga terganggu akibat peristiwa Karhutla. Dalam konteks Indonesia, Kalimantan menjadi salah satu wilayah penting dalam persoalan Karhutla

karena kondisi ekologis, penggunaan lahan, aktivitas manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang saling berkaitan. Dengan demikian, Karhutla tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa kebakaran, tetapi juga sebagai persoalan yang melibatkan hubungan antara manusia, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memiliki peran penting sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dilansir dari website resmi https://www.kehutanan.go.id/, tugas dan fungsi Kemenhut adalah mengatur pengelolaan kawasan hutan, menjaga fungsi ekologis, pemulihan lahan, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pencegahan dan pengendalian Karhutla Kemenhut dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh sebab itu, masyarakat memiliki perhatian khusus pada Kemenhut pada peristiwa Karhutla di Kalimantan. Kemenhut tidak hanya berperan dalam penanganan karhutla, tetapi juga menjadi institusi yang memproduksi dan menyampaikan informasi mengenai kondisi serta upaya pengendalian karhutla kepada masyarakat.

Misalnya pada 21 Agustus 2026, Kemenhut menerbitkan artikel berita berjudul "12.880 Personel Gabungan Tangani Karhutla di Kalimantan, Kemenhut Perkuat Operasi Manggala Agni" (Kementerian Kehutanan, 2026). Artikel berita tersebut sebagai gambaran mengenai cara Kemenhut mengkonstruksi berita yang dirilis. Sebagai media komunikasi kelembagaan, berita pada website Kemenhut tidak hanya menyampaikan informasi mengenai peristiwa karhutla, tetapi juga menghadirkan aktor, tindakan, tanggung jawab, serta cara tertentu dalam menggambarkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Negrine (2003) bahwa sebuah media massa tidak hanya melaporkan suatu kejadian dalam arti netral atau objektif, tetapi media massa menafsirkan kejadian tersebut kepada publik.

Dalam wacana berita, suatu peristiwa tidak hanya disampaikan berdasarkan fakta, tetapi juga dikonstruksikan melalui pilihan bahasa dan informasi yang ditonjolkan. Dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), misalnya, media dapat memilih aspek tertentu untuk ditampilkan, seperti kerusakan lingkungan, dampak terhadap kesehatan masyarakat, atau kerugian ekonomi. Perbedaan dalam pemilihan dan penonjolan informasi tersebut dapat memengaruhi cara suatu peristiwa dipahami oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan kata dan cara aktor yang terlibat dalam peristiwa direpresentasikan turut membentuk makna yang disampaikan melalui berita. Dalam konteks pemberitaan resmi pemerintah, konstruksi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dapat menunjukkan bagaimana pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya diposisikan dalam wacana mengenai Karhutla. Oleh karena itu, konstruksi aktor dalam pemberitaan Karhutla di Kalimantan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana aktor-aktor yang terlibat direpresentasikan dalam wacana pemberitaan.

Studi mengenai kebakaran hutan dan wacana lingkungan telah dilakukan dalam berbagai konteks. Ekayani et al., (2016) menunjukkan bahwa pemberitaan kebakaran hutan dapat memengaruhi pembentukan wacana dan agenda kebijakan. Suhandano et al., (2025) melalui pendekatan corpus-assisted ecolinguistics menemukan adanya perbedaan penekanan dalam pemberitaan kabut asap lintas batas di media Indonesia dan Malaysia, termasuk dalam representasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan. Amin & Shehzad (2026) juga menunjukkan bahwa pemberitaan kebakaran hutan dapat membentuk representasi tertentu mengenai penyebab kebakaran, masyarakat, dan pemerintah. Penelitian Jabeen (2024) memperlihatkan bahwa pilihan leksikal, pengulangan, penamaan, dan cara merujuk pada suatu peristiwa berperan dalam membentuk

wacana mengenai persoalan lingkungan. Sementara itu, Rambe et al., (2026) menunjukkan bahwa pemberitaan bencana yang berkaitan dengan eksploitasi alam dapat membangun kecenderungan wacana tertentu mengenai hubungan antara bencana dan aktivitas manusia.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas wacana kebakaran hutan, bencana alam, dan persoalan lingkungan, masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana wacana Karhutla Kalimantan dibangun melalui berita yang diproduksi oleh institusi pemerintah. Teks berita pada situs web resmi Kementerian Kehutanan dipilih karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam pengendalian Karhutla. Pemberitaan pada situs resmi tersebut juga menjadi sumber penting untuk melihat bagaimana pemerintah mengomunikasikan peristiwa Karhutla kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat informasi mengenai Karhutla, tetapi juga mengkaji bagaimana pemerintah dan masyarakat direpresentasikan dalam teks berita.

Pemberitaan Karhutla dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat cerita ekologis yang dibangun melalui pilihan bahasa, cara aktor ditampilkan, serta aspek lingkungan yang ditonjolkan atau dihilangkan. Penelitian ini menggunakan konsep representasi aktor sosial dari Van Leeuwen (2008) untuk melihat bagaimana pemerintah dan masyarakat dibangun sebagai aktor dalam pemberitaan. Konsep tersebut memungkinkan analisis terkiat bagaimana aktor ditempatkan sebagai pihak yang melakukan tindakan (activation) atau sebagai pihak yang menerima tindakan (passivation). Selain itu, kajian dilakukan melalui perspektif ekolinguistik. Alexander & Stibbe (2014) menjelaskan bahwa ekolinguistik tidak hanya mengkaji teks yang secara eksplisit membicarakan lingkungan, tetapi juga menganalisis bagaimana bahasa membentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam pandangan Stibbe (2021), bahasa mengandung stories we live by, yaitu cerita atau pola pemaknaan yang dapat memengaruhi cara manusia memandang dunia dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemberitaan Karhutla di situs web Kementerian Kehutanan pada tahun 2026 untuk melihat bagaimana media pemerintah mengomunikasikan peristiwa Karhutla kepada publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Social Actor van Leeuwen

Teori Representation of Social Actors (Representasi Aktor Sosial) dikembangkan oleh Theo van Leeuwen pada 1996. Teori ini merupakan salah satu kerangka kerja utama yang digunakan dalam Analisis Wacana Kritis. Van Leeuwen menekankan bahwa teks media atau wacana publik tidak pernah netral dalam menggambarkan seseorang atau kelompok. Strategi linguistik digunakan untuk mengatur relasi kuasa (power relations) dan ideologi dalam wacana melalui representasi aktor sosial. Cara merepresentasikan aktor sosial dalam wacana memegang peran penting dalam membangun dasar ideologis (Wodak & Leeuwen, 2002).

Teori Ekolinguistik

Ekolinguistik merupakan kajian yang membahas hubungan antara bahasa, manusia, dan lingkungan. Alexander & Stibbe (2014) menjelaskan bahwa ekolinguistik tidak hanya mengkaji teks yang secara langsung membahas lingkungan, tetapi juga berbagai wacana berdasarkan pengaruhnya terhadap hubungan manusia dengan dunia ekologis. Dalam perspektif ini, bahasa dapat memengaruhi cara manusia memahami lingkungan serta membentuk sikap dan perilaku terhadap persoalan ekologis.

Stibbe (2021) menjelaskan bahwa bahasa dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang memengaruhi kognisi dan perilaku manusia. Pola bahasa tertentu dapat diterima

sebagai sesuatu yang dianggap wajar dan pada akhirnya membentuk cara pandang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemberitaan Karhutla dapat dikaji untuk melihat bagaimana pilihan bahasa membentuk pemahaman mengenai peristiwa Karhutla serta posisi pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Dalam penelitian ini, ekolinguistik menjadi landasan utama untuk menganalisis bagaimana pemerintah mengomunikasikan peristiwa Karhutla kepada publik melalui berita pada website Kementerian Kehutanan tahun 2026 serta bagaimana pemerintah dan masyarakat dikonstruksikan dalam pemberitaan tersebut.

Stories We Live By **Arran Stibbe**

Stibbe (2015) mengembangkan konsep Stories We Live By yang memandang bahasa sebagai pembentuk cerita atau pola pemaknaan yang digunakan manusia dalam memahami dunia dan lingkungan. Kerangka ini mencakup beberapa kategori, seperti ideology, framing, metaphor, evaluation, identity, erasure, dan salience. Dalam penelitian ini, kategori tersebut digunakan untuk menginterpretasikan konstruksi pemerintah dan masyarakat dalam berita Karhutla. Salience digunakan untuk melihat aspek atau aktor yang ditonjolkan, erasure untuk melihat aspek atau aktor yang tidak atau kurang ditampilkan, framing untuk melihat cara suatu peristiwa disajikan, dan evaluation untuk mengidentifikasi penilaian yang dibangun melalui pilihan bahasa. Sementara itu, identity dan ideology digunakan apabila ditemukan pola bahasa yang menunjukkan pembentukan identitas atau pandangan tertentu terhadap pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, Stories We Live By digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami makna yang dibangun melalui cara pemerintah dan masyarakat ditampilkan dalam pemberitaan Karhutla.

Dalam penelitian ini, konsep *Stories We Live By* dari Stibbe (2015) digunakan untuk mengidentifikasi cerita ekologis yang dibangun melalui pilihan bahasa dan representasi aktor dalam pemberitaan Karhutla. Penilaian terhadap cerita ekologis dilakukan dengan menggunakan *ecosophy* atau prinsip ekologis sebagai dasar evaluasi, yaitu sejauh mana suatu wacana mendukung keberlanjutan ekosistem, mengurangi kerusakan lingkungan, serta mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan lingkungan yang saling berkaitan. Berdasarkan prinsip tersebut, cerita ekologis dinilai cenderung mendukung keberlanjutan apabila menonjolkan pencegahan kebakaran, partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap kerusakan ekologis. Sebaliknya, cerita ekologis dinilai berpotensi merugikan keberlanjutan apabila menormalisasi tindakan yang merusak lingkungan atau mengaburkan penyebab dan dampak kerusakan ekologis

Penerapan tersebut dilakukan melalui enam kategori analisis. *Salience* digunakan untuk mengidentifikasi aktor dan aspek ekologis yang ditonjolkan melalui frekuensi, pilihan leksikal, serta struktur kalimat. *Erasure* digunakan untuk mengidentifikasi aktor, penyebab, atau dampak ekologis yang tidak disebutkan atau kurang memperoleh perhatian dalam teks. *Framing* digunakan untuk mengidentifikasi cara Karhutla dikonstruksikan, misalnya sebagai persoalan pengendalian teknis, tanggung jawab manusia, atau penegakan hukum. *Evaluation* digunakan untuk mengidentifikasi penilaian positif atau negatif yang dibangun melalui pilihan kata dan konstruksi bahasa. *Identity* digunakan untuk mengkaji identitas yang dilekatkan pada masyarakat dan pemerintah, sedangkan *ideology* digunakan untuk mengidentifikasi pola asumsi atau pandangan yang berulang mengenai hubungan manusia, institusi, dan lingkungan. Keenam kategori tersebut diterapkan berdasarkan bukti tekstual yang tersedia. Kategori yang tidak didukung oleh bukti memadai tidak ditetapkan sebagai temuan. Dengan demikian, analisis ekolinguistik tidak hanya mengidentifikasi aktor yang ditonjolkan, tetapi juga mengevaluasi cerita ekologis yang dibangun serta keterbatasan representasi lingkungan dalam pemberitaan.

Linguistik Korpus dalam Analisis Wacana

Linguistik korpus merupakan pendekatan yang menggunakan kumpulan teks untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahasa secara sistematis. Baker (2021) menjelaskan bahwa analisis wacana berbasis korpus dapat dilakukan melalui teknik seperti keywords, collocation, dan concordance untuk menemukan pola kebahasaan sebelum dilakukan interpretasi terhadap makna wacana. Dalam penelitian ini, linguistik korpus digunakan untuk menganalisis delapan berita Karhutla Kalimantan yang diterbitkan pada website Kementerian Kehutanan tahun 2026 dengan bantuan perangkat lunak AntConc. Keywords digunakan untuk menemukan kata-kata yang menonjol dalam korpus, collocation untuk mengidentifikasi kata-kata yang cenderung muncul bersama, dan concordance untuk melihat penggunaan kata dalam konteks kalimat. Hasil analisis korpus digunakan untuk menemukan pola bahasa yang berkaitan dengan pemerintah, masyarakat, Karhutla, dan lingkungan. Pola tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan *Stories We Live By* dalam perspektif ekolinguistik. Dengan demikian, linguistik korpus berfungsi sebagai pendekatan untuk menemukan bukti kebahasaan, sedangkan ekolinguistik dan *Stories We Live By* menjadi landasan untuk memahami makna dan konstruksi yang terbentuk dalam pemberitaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods research* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Menurut Creswell (1999) *mixed methods research* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan dan mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan penelitian. Penggabungan kedua pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memanfaatkan kelebihan data kuantitatif dalam mengidentifikasi pola atau kecenderungan secara terukur serta data kualitatif dalam menjelaskan makna, konteks, dan interpretasi terhadap pola yang ditemukan. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data melalui linguistik korpus, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif representasi aktor dalam pemberitaan Karhutla Kalimantan.

Data penelitian berupa delapan berita mengenai Karhutla Kalimantan yang dipublikasikan pada situs web resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun 2026 https://www.kehutanan.go.id/updatekarhutla?category=berita. Periode pemberitaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 19–25 Agustus 2026. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada intensitas publikasi berita mengenai Karhutla pada website resmi Kementerian Kehutanan serta tingginya jumlah pembaca pada periode tersebut. Pertimbangan ini digunakan untuk memperoleh data pemberitaan yang relevan dalam mengkaji representasi aktor dalam wacana karhutla di Kalimantan. Berikut ini disajikan tabel informasi mengenai korpus berita yang dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Judul Berita Karhutla

ID	Judul	Tanggal Terbit	Tautan Berita
B1	Menteri Kehutanan Apresiasi “Forest Hero” Rudiansyah, Remaja yang Ikut Padamkan Karhutla di Palangka Raya	19 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/menteri-kehutanan-apresiasi-forest-hero-rudiansyah-remaja-yang-ikut-padamkan-karhutla-di-palangka-raya
B2	Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan, Tambah Dukungan Udara dan Pemadaman Darat	20 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/pemerintah-perkuat-operasi-terpadu-karhutla-di-kalimantan-tambah-dukungan-udara-dan-pemadaman-darat
B3	Hotspot Nasional Turun 56 Persen, Pengendalian Karhutla Tetap Diperkuat	21 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/hotspot-nasional-turun-56-persen-pengendalian-karhutla-tetap-diperkuat

ID	Judul	Tanggal Terbit	Tautan Berita
B4	12.880 Personel Gabungan Tangani Karhutla di Kalimantan, Kemenhut Perkuat Operasi Manggala Agni	21 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/12-880-personel-gabungan-tangani-karhutla-di-kalimantan-kemenhut-perkuat-operasi-manggala-agni
B5	Menhut Raja Antoni Turun ke Lokasi Karhutla Kalsel, Operasi Pemadaman Diperkuat	23 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-raja-antoni-turun-ke-lokasi-karhutla-kalsel-operasi-pemadaman-diperkuat
B6	Menhut Pimpin Rakor Karhutla Kalbar, Perkuat Operasi Darat-Udara dan Kolaborasi Lintas Pihak	24 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-pimpin-rakor-karhutla-kalbar-perkuat-operasi-darat-udara-dan-kolaborasi-lintas-pihak
B7	Kemenhut Bongkar Motif di Balik Karhutla, Dari Jual Beli Kawasan Hingga Perambahan, Korporasi dan Individu Jadi Tersangka	24 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-bongkar-motif-di-balik-karhutla-dari-jual-beli-kawasan-hingga-perambahan-korporasi-dan-individu-jadi-tersangka
B8	Kemenhut Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Hingga Pembekuan Perizinan Berusaha	25 Agustus 2026	https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-jatuhkan-sanksi-6-perusahaan-terkait-karhutla-hingga-pembekuan-perizinan-berusaha

Kedelapan berita tersebut dikompilasi menjadi sebuah korpus yang terdiri atas 5.902 token. Korpus kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak AntConc versi 3.5.9 dan dianalisis menggunakan frekuensi, kolokasi (collocation), dan konkordansi (concordance). Keywords digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang memiliki frekuensi atau tingkat kemunculan yang menonjol dalam korpus serta membantu menemukan tema utama dalam pemberitaan (Baker, 2021). Selanjutnya, collocation digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antarkata dan kecenderungan kata-kata yang muncul secara bersamaan, sedangkan concordance digunakan untuk mengamati penggunaan kata dalam konteks kalimat. Dalam kajian ekolinguistik, analisis kolokasi dapat membantu mengidentifikasi pola penggunaan bahasa yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan (Istianah & Suhandano, 2022).

Langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan dan penyusunan data, pembentukan korpus, analisis keywords, collocation, dan concordance, serta interpretasi kualitatif menggunakan konsep representasi aktor sosial Van Leeuwen (2008), khususnya kategori activation dan passivation. Konsistensi pengodean diperiksa dengan meninjau kembali posisi aktor dalam struktur kalimat, verba, dan konteks berita untuk memastikan ketepatan klasifikasi sebagai pelaku atau pihak yang dikenai tindakan. Sebagai contoh, “masyarakat” dikategorikan sebagai passivation ketika menjadi pihak yang diingatkan dan sebagai activation ketika melakukan tindakan pengendalian api. Sementara itu, “pemerintah” dikategorikan sebagai activation ketika melakukan tindakan, seperti memantau titik panas dan memperkuat operasi terpadu. Pemeriksaan ulang ini memastikan setiap kategori memiliki dasar tekstual yang jelas dan dapat ditelusuri. Selanjutnya, temuan dianalisis dalam perspektif ekolinguistik melalui konsep stories we live by (Stibbe, 2021), terutama salience, erasure, framing, evaluation, identity, dan ideology. Pada tahap ini, hasil analisis kuantitatif berupa frekuensi kemunculan aktor, kolokasi, dan konteks penggunaan kata digunakan sebagai dasar untuk melakukan interpretasi kualitatif terhadap representasi aktor sosial. Dengan demikian, pendekatan mixed methods dalam penelitian ini diterapkan melalui integrasi hasil analisis linguistik korpus dengan analisis wacana kualitatif. Integrasi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pilihan bahasa dan pola representasi aktor membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam pemberitaan Karhutla Kalimantan. Analisis ekolinguistik selanjutnya digunakan untuk melihat bagaimana pola penggunaan bahasa dalam pemberitaan membentuk pemaknaan terhadap Karhutla serta kecenderungan wacana mengenai aktor sosial yang dibahas di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frekuensi Kemunculan Aktor dalam Wacana Karhutla

Berdasarkan hasil analisis terhadap delapan teks berita pada website Kemenhut terkait Karhutla Kalimantan, ditemukan sejumlah aktor yang direpresentasikan dalam pemberitaan. Identifikasi aktor dilakukan dengan mengamati frekuensi kemunculan nama atau istilah yang merujuk pada aktor dalam korpus berita. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang paling menonjol dalam pemberitaan sebagai tahap awal untuk mengkaji representasi aktor berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Hasil penghitungan frekuensi kemunculan aktor disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Frekuensi kemunculan aktor

No.	Aktor	Frekuensi	Rentang Dokumen *(Range)*
1.	Masyarakat	65	7
2.	Pemerintah	39	8
3.	Manggala Agni	24	7
4.	Kementerian Kehutanan	21	7
5.	Menteri Kehutanan	12	4
6.	Raja Juli	7	4

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi kemunculan aktor yang paling dominan dalam berita Karhutla di Kalimantan adalah “masyarakat” sebanyak 65 kali. Sementara itu, kata “pemerintah” muncul sebanyak 39 kali. Namun, apabila dilakukan penggabungan konseptual (*conceptual clustering*) berdasarkan teori representasi aktor sosial Theo van Leeuwen (2008), ditemukan variasi leksikal yang sangat kaya untuk merujuk pada representasi pemerintah sebagai otoritas negara. Aktor “manggala agni” “kementerian kehutanan”, “menteri kehutanan”, dan “Raja Juli” dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan yang mewakili pemerintah, dalam hal ini Kemenhut. Dengan kata lain, data tersebut menunjukan variasi penggunaan istilah yang mewakili “pemerintah” sebagai aktor yang ditonjolkan. Tabel berikut ini menunjukkan penggabungan konseptual aktor pemerintah.

Tabel 3. *Conceptual Clustering Aktor Pemerintah*

Kelompok Makro-Aktor	Unsur Konseptual yang digabung	Total
Pemerintah	*Pemerintah (39) + Manggala Agni (24) + Kementerian Kehutanan (21) + Menteri Kehutanan (12) + Raja Juli (4)*	*100*

Penelitian ini secara spesifik memisahkan antara frekuensi bentuk leksikal (teks) dengan jumlah penyebutan kelompok aktor secara konseptual. Berdasarkan data temuan pada aplikasi AntConc, ditemukan bahwa frasa 'Menteri Kehutanan' dan nama individu 'Raja Juli' muncul secara bersamaan dalam satu konstruksi kalimat yang sama yaitu sebanyak 3 kali. Ketiga data tumpang tindih tersebut dilebur ke dalam satu rujukan aktor sosial yang sama untuk mencegah kesalahan hitung ganda *(double counting bias).* Oleh karena itu, meskipun akumulasi penyebutan aktor Raja Juli pada tabel 2 sejumlah 7 kali, penyebutan konseptual untuk Raja Juli adalah 4 kali.

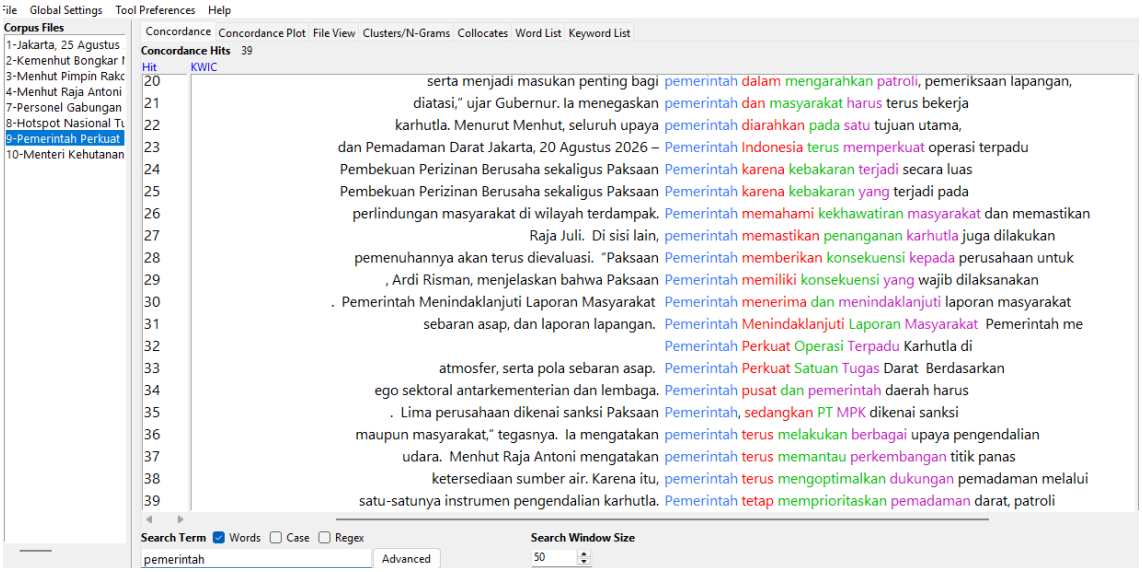
Aktor “manggala agni” (muncul 24 kali) mewakili institusi pemerintah. Dalam hal ini, manggala agni merupakan brigade khusus pengendali Karhutla yang dibentuk oleh Kemenhut. Dilansir dari https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/, Manggala Agni bertindak sebagai garda terdepan dalam proses pemadaman Karhutla demi kelestarian lingkungan

serta udara bersih di Indonesia. Sementara itu, frasa “Kementerian Kehutanan” (muncul 21 kali) sebagai pemilik media turut dihadirkan sebagai aktor dalam berita Karhutla Kalimantan. Frasa “menteri kehutanan” (muncul 12 kali) sebagai bagian dari pejabat negara turut dihadirkan dalam berita karhutla. Selanjutnya, frasa “Raja Juli” (muncul 4 kali) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan juga dihadirkan sebagai individualisasi aktor yang mewakili pemerintah. Penyebutan nama tokoh individual ini berfungsi untuk memberikan pengaruh personal (*personalization*) serta membangun citra kepemimpinan yang tanggap dan bertanggung jawab secara langsung di wilayah Kalimantan.

Representasi Aktor Sosial dalam Wacana Karhutla

Representasi Masyarakat

Dalam pemberitaan Karhutla Kalimantan pada website Kemenhut, kata “masyarakat” dapat dianalisis berdasarkan konkordansinya. McEnery & Hardie (2011) menjelaskan bahwa perangkat konkordansi memungkinkan peneliti menelusuri kata dan frasa tertentu dalam korpus serta menampilkan konteks linguistik di sekitar keywords. Dalam delapan teks berita yang dianalisis, kata “masyarakat” muncul dalam tujuh berita yang diterbitkan oleh Kemenhut mengenai Karhutla Kalimantan. Hal ini menunjukkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam bencana ekologis ini. Konkordansi kata “masyarakat” yang ditemukan dalam aplikasi AntConc 3.5.9 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Nukilan Konkordansi aktor masyarakat pada aplikasi AntConc

Pada analisis konkordansi ini, peneliti mengidentifikasi konteks dari rangkaian kata yang berada di sebelah kiri dan kanan kata “masyarakat”. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bentuk representasi “masyarakat” pada peristiwa Karhutla Kalimantan, sebagai aktor yang direpresentasikan secara positif atau negatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Meka & Sabardila (2025) bahwa analisis konkordansi dapat digunakan untuk melihat bagaimana representasi orang atau kelompok digambarkan, baik secara positif maupun negatif.

Tabel 4. Konkordansi aktor masyarakat

No.	Konteks kiri	*Node*	Konteks kanan	ID
1	Sekali lagi saya mengingatkan	masyarakat	agar jangan bermain api. Jangan ada lagi pembukaan lahan di musim ini dengan cara membakar.	B1
2	Di tengah kondisi cuaca yang kering, Raja Juli mengingatkan	masyarakat	agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.	B1
3	Manggala Agni bersama	masyarakat	, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai unsur lainnya terus bekerja mengendalikan api dan menekan dampaknya terhadap masyarakat.	B7

Data (1) dan (2) pada tabel di atas menunjukkan bahwa aktor masyarakat diposisikan sebagai objek dari kata kerja imperatif "mengingatkan". Data tersebut merupakan penggalan pernyataan yang dilontarkan Raja Juli Antoni selaku menteri kehutanan. Hal ini menunjukkan posisi masyarakat sebagai subjek yang bertanggung jawab dan perlu diingatkan oleh otoritas pejabat dalam upaya mitigasi kebakaran. Strategi linguistik lain yang digunakan untuk menonjolkan aktor dalam data (1) dan (2) di atas adalah passivation (subjection), kata "masyarakat" diposisikan sebagai objek tindakan dari pelaku otoritas "saya" atau "Raja Juli". Masyarakat tidak diberi peran aktif untuk bersuara, melainkan dikenai pembatasan, seperti pada frasa "jangan bermain api" dan "tidak melakukan pembukaan lahan". Hal ini sejalan dengan pendapat Van Leeuwen (2008) bahwa passivation memposisikan aktor sebagai objek yang dikenai tindakan.

Data (3) menunjukkan bahwa aktor masyarakat diposisikan sebagai bagian dari pihak yang ikut aktif dalam penanggulangan Karhutla Kalimantan, turut aktif dalam sinergi multipihak. Van Leeuwen (2008) mengkategorikan posisi ini sebagai Activation, yaitu menyoroti aktor sosial sebagai subjek yang menjalankan tindakan. Kata "masyarakat" dimunculkan dalam posisi aktif sebagai subjek tindakan (agent) yang turut bekerja memadamkan api Karhutla. Di sisi lain, kata masyarakat disejajarkan dengan aktor pemerintah seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Peran masyarakat diletakkan setelah Manggala Agni yang menunjukkan kepemimpinan tindakan tetap berada pada aparat negara (Pemerintah).

Berdasarkan analisis pada konkordansi kata "masyarakat" di atas, dapat dikatakan bahwa wacana yang dibangun dalam website Kemenhut mengenai Karhutla Kalimantan ini bersifat ambivalen. Masyarakat dikonstruksikan secara ambivalen, artinya di satu sisi dikonstruksikan terlibat aktif dalam penanganan Karhutla Kalimantan, namun di sisi lain dikonstruksikan sebagai aktor yang berpotensi sebagai penyebab kebakaran sehingga perlu terus diedukasi mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar *(land clearing)*.

Tabel 5. Kolokasi aktor masyarakat

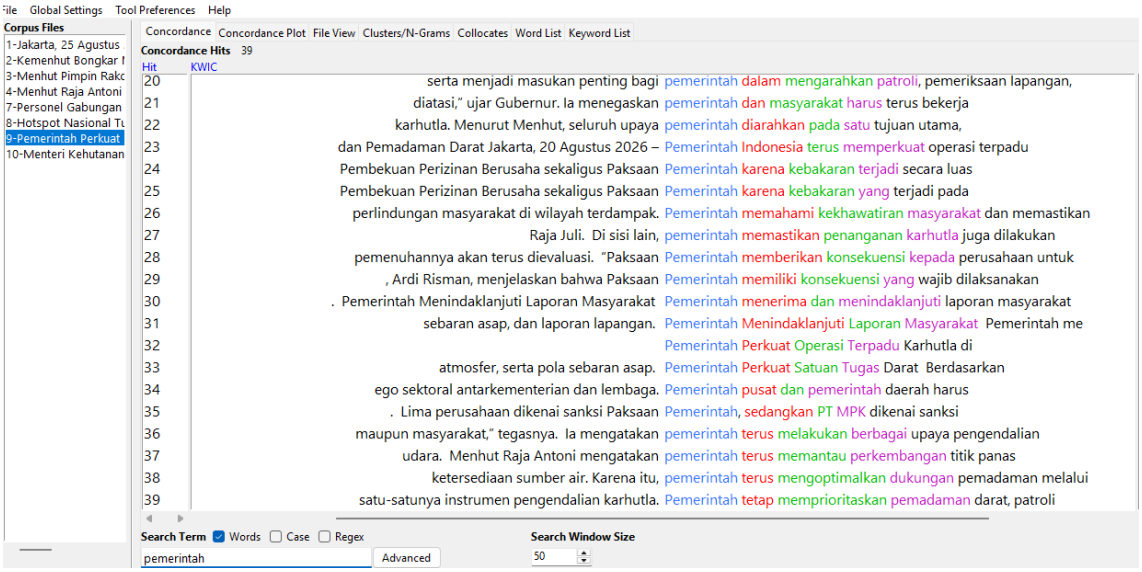
Aktor	Kolokat	Rentang Jendela	Ambang Frekuensi	Ukuran Asosiasi
masyarakat	menerima, pelaku, berapa, akibatnya	L5 — R5	8	MI ≥ 3.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa kata "masyarakat" berkolokasi dengan verba mental "menerima". Misalnya pada frasa "masyarakat menerima bantuan…", "masyarakat menerima edukasi…". Hal ini mengindikasikan proses pasivasi (passivation) melalui penggunaan verba mental. Proses pasivasi menampilkan aktor sosial sebagai pihak yang mengalami atau menerima tindakan dari aktor lain, bukan sebagai subjek yang menginisiasi tindakan activation (Van Leeuwen, 2008). Selanjutnya kata yang berkolokat dengan aktor masyarakat

adalah pelaku, misalnya pada kalimat “Masyarakat dan pelaku usaha dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar”. pada konteks kalimat tersebut masyarakat mengalami aktivasi (*activation*). Masyarakat dan pelaku usaha ditempatkan sebagai subjek yang melakukan tindakan (*membuka atau membersihkan lahan*). Namun, aktivasi ini dimodifikasi oleh modalitas “dilarang”. Masyarakat direpresentasikan sebagai agen aktif yang destruktif terhadap lingkungan, sehingga harus dikontrol secara ketat oleh negara, dalam hal ini kementerian kehutanan. Hal ini mengindikasikan masyarakat sebagai *activation with negative agency* yaitu ketika seorang aktor sosial dihadirkan secara aktif sebagai subjek, namun peran aktif yang mereka lakukan dinilai buruk, destruktif, atau merugikan. Kolokat “berapa” mengacu pada kerugian yang ditimbulkan akibat bencana Karhutla ini, misalnya berapa hektar lahan yang terbakar, berapa masyarakat yang terdampak, dan berapa kerugian ekonomi. Kolokasi “akibatnya” mengacu pada dampak yang timbul akibat Karhutla, seperti kesehatan warga terutama anak-anak memburuk, penerbangan dibatalkan, dan terganggunya aktivitas sekolah.

Representasi Pemerintah

Berikut ini disajikan data konkordansi pada kata “pemerintah” dari korpus AntConc terkait berita Karhutla Kalimantan.



Gambar 2. Nukilan Konkordansi aktor pemerintah pada aplikasi AntConc

Berdasarkan data di atas, kata “pemerintah” disandingkan dengan frasa verba seperti terus memperkuat, terus memantau, terus mengoptimalkan, terus melakukan, dan terus memperkuat. Selain itu, tampak pula verba transitif seperti memastikan dan memberikan. Dalam konteks wacana, penggunaan frasa verba dan verba transitif pada kata pemerintah merepresentasikan Activation. Pemerintah dikonstruksikan secara konsisten sebagai aktor utama yang aktif (agent), tanggap, proaktif, dan memegang kendali penuh dalam penanganan Karhutla Kalimantan. Aktivasi menyoroti aktor sosial sebagai subjek dalam suatu proses yang menjalankan tindakan (Stibbe, 2015; Van Leeuwen, 2008). Berikut ini contoh data penggunaan verba aktif dalam konkordansi kata “Pemerintah”.

Tabel 6. Konkordansi aktor pemerintah

No.	Konteks kiri	*Node*	Konteks kanan	ID
4	Di sisi lain,	pemerintah	memastikan penanganan karhutla juga dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan.	B1
5	Menhut Raja Antoni mengatakan	pemerintah	terus memantau perkembangan titik panas di sejumlah wilayah Kalsel.	B5
6	Jakarta, 20 Agustus 2026 –	pemerintah	Indonesia terus memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.	B2

Berdasarkan data pada tabel tersebut, kata “pemerintah” dikonstruksi secara konsisten dalam posisi activation. Pemerintah secara aktif sebagai aktor yang menangani Karhutla Kalimantan. Pemerintah bertindak sebagai subjek yang melakukan verba aksi misalnya “memastikan penegakan hukum”, “memantau perkembangan titik panas”, dan “memperkuat operasi terpadu”. Data (4) kata pemerintah dilekatkan pada verba “memastikan” yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani Karhutla. Frasa “pemerintah memastikan penanganan Karhutla juga dilakukan melalui penegakan hukum…” menunjukkan perluasan peran aktor pemerintah (dual activation). Pemerintah tidak hanya dikonstruksikan secara aktif pada level pemadaman api, tetapi juga sebagai aktor yang menyelidiki kausalitas (siapa yang membakar hutan).

Data (5) menunjukkan individualisasi (individualization) pada konteks kiri “Menhut Raja Antoni mengatakan” yang berasosiasi langsung dengan pemerintah. Hal ini memberikan legitimasi personal berkedudukan tinggi (autority representation) pada tindakan penanganan Karhutla. Aktor pemerintah digambarkan sebagai aktor utama yang memiliki peran aktif dalam upaya pengendalian dan pemadaman Karhutla Kalimantan. Kata kerja “memantau” merupakan verba transitif yang termasuk action verb. Hal ini menempatkan pemerintah pada posisi Activation (aktor utama yang bertindak aktif). Pemerintah digambarkan tidak bersikap pasif atau menunggu krisis Karhutla ini membesar, melainkan melakukan monitoring penyebaran titik panas.

Data (6) kata “pemerintah” dilekatkan langsung pada identitas negara/bangsa (Indonesia). Strategi ini disebut sebagai nationalization, yang digunakan untuk memperkuat wacana bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen nasional yang resmi dan berdaulat. Frasa “terus memperkuat operasi” merepresentasikan eskalasi tindakan, yaitu peningkatan kapasitas, alokasi sumber daya, dan kesiapsiagaan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini membangun citra positif pemerintah yang tidak sekadar “bertindak”, tetapi terus meningkatkan kualitas tindakannya.

Tabel 7. Kolokasi aktor pemerintah

Aktor	Kolokat	Rentang Jendela	Ambang Frekuensi	Ukuran Asosiasi
Pemerintah	Terdekat, pusat, menerima, menindaklanjuti	L5 — R5	5	MI ≥ 3.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa kata “pemerintah” berkolokasi dengan kata “terdekat” yang merepresentasikan pemerintah daerah (pemda/pemkot/pemkab) dan posko bencana terdekat yang berada di garda terdepan bencana Karhutla. Sementara itu, kata “pusat” berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB), BMKG, TNI, Polri, dan Manggala Agni yang banyak dibahas dalam konstruksi berita Karhutla. Hal ini menunjukkan fungsionalisasi yaitu strategi penggambaran aktor berdasarkan peran, pekerjaan, atau aktivitas yang dijalankan dalam suatu peristiwa . Selanjutnya, ditemukan verba "menerima" dan "menindaklanjuti" yang berkolokasi dengan aktor pemerintah. Verba "menerima" mengindikasikan kesiapan pemerintah untuk menampung berbagai laporan masyarakat terkait situasi dan kondisi di sekitar wilayah terdampak Karhutla. Verba "menindaklanjuti" merupakan verba aksi (action verb). Verba tersebut mengindikasikan pemerintah sebagai subjek aktif atau activation, yaitu aktor sosial diposisikan sebagai peserta dalam suatu proses yang menjalankan tindakan (Stibbe, 2015). Pemerintah direpresentasikan secara positif sebagai problem solver yang responsif yakni aktor yang siap menerima laporan dan menindaklanjuti permasalahan dalam penanganan Karhutla Kalimantan.

Strategi linguistik lain yang digunakan dalam wacana Karhutla Kalimantan oleh Kementerian Kehutanan adalah penggunaan aktor yang merepresentasikan pemerintah, misalnya Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan, dan Raja Juli. Aktor-aktor spesifik tersebut merupakan bentuk representasi dari institusi pemerintah. Manggala Agni sebagai bentuk fungsionalisasi, Kementerian Kehutanan sebagai bentuk impersonalisasi. Strategi representasi aktor sosial tidak ditampilkan sebagai manusia bernyawa (human beings), melainkan digantikan oleh entitas nonmanusia, seperti nama lembaga ((Van Leeuwen, 2008). Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Raja Juli sebagai bentuk individualisasi. Berikut ini data individualisasi dalam berita Karhutla Kalimantan.

> *(7) Di tengah kondisi cuaca yang kering, Raja Juli mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (B2).*
>
> *(8) Ia mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengendalian karhutla secara terpadu, mulai dari pemadaman di darat, water bombing, hingga kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan (B1).*

Berdasarkan data di atas, Kemenhut mencantumkan frasa Raja Juli sebagai menteri kehutanan yang saat ini menjabat. Data (7) menunjukkan penonjolan aktor melalui individualisasi. Verba "mengingatkan" mengindikasikan peran aktif aktor tidak hanya dalam penanganan kebakaran hutan, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat dalam kasus karhutla. Data (8) menunjukkan penggunaan pronomina "ia" yang merujuk pada Raja Juli. Penyebutan tokoh secara personal menghubungkan tindakan pemerintah dengan figur yang memiliki otoritas formal dalam penyusunan kebijakan dan penanganan Karhutla. Dalam konstruksi tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengendali dan koordinator, tetapi juga sebagai komunikator yang memberikan arahan mengenai perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan lingkungan. Konstruksi "mengingatkan masyarakat" menghubungkan tindakan manusia dengan risiko ekologis karena pembukaan lahan dengan cara membakar ditempatkan sebagai tindakan yang perlu dihindari dalam konteks pencegahan Karhutla.

Perspektif Ekolinguistik dalam Wacana Karhutla

Temuan mengenai representasi pemerintah tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui perspektif ekolinguistik, khususnya konsep stories we live by Stibbe (2015), yang melihat bahasa sebagai praktik yang membentuk cara manusia memaknai hubungan dengan lingkungan. Dalam konteks pemberitaan Karhutla, pilihan bahasa yang menghubungkan tindakan pemerintah, perilaku masyarakat, dan kondisi lingkungan membentuk story mengenai tanggung jawab serta pengelolaan risiko ekologis. Perspektif ini digunakan untuk

melihat bagaimana representasi aktor yang telah diidentifikasi melalui analisis van Leeuwen berkontribusi pada konstruksi hubungan manusia, institusi, dan lingkungan dalam wacana Karhutla. Temuan mengenai perspektif ekolinguistik dalam pemberitaan Karhutla Kalimantan dapat dipahami lebih lanjut melalui penjelasan berikut.

> *(9) Menteri Kehutanan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla tidak berhenti ketika api sudah muncul. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran (B1).*

Data (9) merepresentasikan masyarakat sebagai aktor yang memiliki peran aktif dan preventif dalam pengendalian Karhutla. Secara kebahasaan, konstruksi tersebut terlihat pada frasa "partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla" dan klausa "masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran". Kata "partisipasi" menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian, sedangkan konstruksi "memiliki peran penting" memberikan atribusi bahwa masyarakat mempunyai posisi yang berarti dalam upaya tersebut. Peran itu kemudian diperjelas melalui verba "mencegah", yang menunjukkan tindakan sebelum kebakaran terjadi.

Dalam wacana, frasa "tidak berhenti ketika api sudah muncul" memperluas makna partisipasi tersebut. Klausa "ketika api sudah muncul" menandai kondisi ketika kebakaran telah terjadi, sedangkan "tidak berhenti" menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak dibatasi pada tahap tersebut. Dengan demikian, wacana mengonstruksikan partisipasi masyarakat sebagai tindakan yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk pada tahap sebelum kebakaran melalui pencegahan.

Dalam perspektif ekolinguistik, pilihan kata "partisipasi", "pengendalian", dan "mencegah" menghubungkan masyarakat secara langsung dengan tindakan pengelolaan lingkungan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang berada dalam konteks persoalan Karhutla, tetapi sebagai bagian dari tindakan ekologis untuk mengurangi risiko kebakaran. Wacana tersebut dengan demikian membangun hubungan manusia–lingkungan yang bersifat partisipatif, yaitu masyarakat dikonstruksikan memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga kondisi lingkungan melalui tindakan pencegahan. Kolokasi "masyarakat" dengan "memahami" juga dapat memperkuat konstruksi ini dengan menunjukkan dimensi pengetahuan atau kesadaran yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam menghadapi persoalan Karhutla. Dengan demikian, data (9) membangun pemahaman bahwa pencegahan Karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab ekologis yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut direalisasikan melalui pilihan leksikal dan struktur wacana yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki peran, kapasitas, dan keterlibatan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kebakaran.

> *(10) Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan karhutla juga dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan.*

Data (10) merepresentasikan pemerintah sebagai aktor institusional yang memiliki agensi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam penanganan Karhutla melalui penegakan hukum. Dalam perspektif AWK van Leeuwen, representasi tersebut tampak melalui strategi aktivasi, yaitu ketika pemerintah ditempatkan sebagai pelaku tindakan dalam konstruksi "pemerintah memastikan penanganan karhutla". Verba "memastikan" menunjukkan tindakan aktif pemerintah untuk menjamin terlaksananya penanganan Karhutla. Agensi tersebut diperjelas melalui frasa "melalui penegakan hukum", yang menempatkan tindakan pemerintah dalam ranah kelembagaan dan aturan hukum.

Konstruksi “pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan” kemudian membentuk posisi aktor lain dalam wacana. Verba “melakukan” pada frasa “melakukan pembakaran” dan “menyebabkan” pada frasa “menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan” mengaktivasi pihak tersebut sebagai pelaku tindakan yang berdampak terhadap lingkungan. Sementara itu, kata “terbukti” menunjukkan bahwa tindakan hukum diarahkan kepada pihak yang telah dibuktikan melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan. Struktur tersebut membentuk relasi sosial yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan pihak pelaku sebagai sasaran penegakan hukum.

Konstruksi tersebut membingkai Karhutla bukan semata-mata sebagai peristiwa kebakaran yang membutuhkan penanganan teknis, tetapi sebagai persoalan yang berkaitan dengan tindakan manusia, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Posisi pemerintah sebagai pelaksana penegakan hukum menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Karhutla dikonstruksikan melalui mekanisme kelembagaan, sedangkan penyebutan pihak yang melakukan pembakaran menghubungkan kerusakan ekologis dengan tindakan aktor tertentu. Dengan demikian, wacana data (10) membangun hubungan antara kewenangan institusional, tindakan manusia, dan konsekuensi terhadap lingkungan.

Dalam perspektif ekolinguistik, pilihan leksikal “pembakaran”, “kerusakan hutan dan lingkungan”, dan “penegakan hukum” membangun story bahwa tindakan manusia dapat menghasilkan konsekuensi ekologis dan karena itu memerlukan pengendalian kelembagaan. Lingkungan direpresentasikan sebagai entitas yang terdampak, sementara hukum menjadi mekanisme sosial untuk merespons tindakan yang menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, data (10) memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan dalam wacana Karhutla dikonstruksikan melalui hubungan antara perilaku manusia, kewenangan pemerintah, dan penegakan aturan.

Berdasarkan perspektif *Stories We Live By* dari Stibbe (2015), representasi masyarakat dan pemerintah dalam pemberitaan Karhutla dapat dianalisis melalui kategori *salience*, *erasure*, *framing*, *evaluation*, *identity*, dan *ideology*. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi cara pemberitaan membangun pemahaman mengenai tanggung jawab manusia, penanganan kebakaran, dan perlindungan lingkungan. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip ekologis yang menempatkan pencegahan kerusakan, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan manusia sebagai pertimbangan utama.

Salience

Penonjolan aktor terlihat dari frekuensi kemunculan kata “masyarakat” sebanyak 65 kali, “pemerintah” sebanyak 39 kali, “Manggala Agni” sebanyak 24 kali, dan “Kementerian Kehutanan” sebanyak 21 kali. Setelah penggabungan konseptual terhadap representasi pemerintah, korpus menunjukkan kuatnya kehadiran aktor kelembagaan dalam pemberitaan. Penonjolan tersebut diperkuat oleh konstruksi seperti “pemerintah terus memperkuat operasi terpadu”, “pemerintah terus memantau perkembangan titik panas”, dan “Manggala Agni bersama masyarakat [...] terus bekerja mengendalikan api”.

Berdasarkan perspektif ekolinguistik, penonjolan tersebut membangun pemahaman yang berpusat pada aktor sosial dan tindakan pengendalian Karhutla. Upaya pemadaman, pemantauan, koordinasi, dan penegakan hukum memperoleh perhatian yang jelas. Sebaliknya, kondisi ekosistem yang mengalami kerusakan tidak menjadi fokus utama dalam kutipan-kutipan yang dianalisis. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberitaan lebih menonjolkan tindakan penanganan dan pengendalian daripada uraian terperinci mengenai kondisi ekologis yang terdampak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardani dan

Suprayitno (2026), yang menunjukkan bahwa pemberitaan Karhutla cenderung menonjolkan tindakan penanganan, tetapi kurang mengkritisi kondisi ekosistem serta keberlanjutan lingkungan.

Erasure

Kategori erasure digunakan untuk mengidentifikasi aspek ekologis dan sosial yang tidak disebutkan atau kurang ditampilkan dalam pemberitaan. Dalam data yang dianalisis, kerusakan hutan dan lingkungan disebutkan dalam konstruksi "pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan". Namun, bukti yang tersedia belum menunjukkan pembahasan terperinci mengenai perubahan kondisi ekosistem, dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati, atau pemulihan ekosistem setelah kebakaran. Oleh karena itu, temuan yang dapat dinyatakan secara hati-hati adalah bahwa aspek-aspek tersebut kurang memperoleh perhatian dalam kutipan yang dianalisis. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh delapan berita menghilangkan informasi tersebut, tetapi menunjukkan keterbatasan penonjolan aspek ekologis dalam bukti yang dibahas. Penilaian ini juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemerintah mengabaikan pemulihan lingkungan tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap keseluruhan isi berita.

Framing

Framing Karhutla terlihat melalui dua pola utama. Pertama, Karhutla dibingkai sebagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku manusia dan kepatuhan terhadap aturan, sebagaimana terlihat pada kutipan "masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Kedua, Karhutla dibingkai sebagai persoalan yang membutuhkan tindakan kelembagaan, sebagaimana terlihat pada kutipan "pemerintah memastikan penanganan karhutla juga dilakukan melalui penegakan hukum".

Kedua konstruksi tersebut membentuk pemahaman bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan pengendalian dri perilaku manusia dan respons kelembagaan. Framing ini dapat mendukung upaya perlindungan lingkungan karena menempatkan pencegahan pembakaran dan penegakan hukum sebagai bagian dari penanganan kerusakan ekologis. Meskipun demikian, pembingkaian yang berpusat pada perilaku masyarakat dan tindakan pemerintah belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh faktor yang berkaitan dengan Karhutla, termasuk kondisi ekologis dan faktor struktural penggunaan lahan.

Evaluation

Evaluasi pada pemberitaan Karhutla terlihat melalui pilihan kata yang membangun penilaian terhadap tindakan aktor. Pada kutipan "Menteri Kehutanan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla tidak berhenti ketika api sudah muncul", frasa "partisipasi masyarakat" dan "memiliki peran penting" memberikan penilaian positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Sebaliknya, konstruksi "jangan bermain api" dan "tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" membentuk penilaian negatif terhadap tindakan pembakaran lahan.

Pada representasi pemerintah, penggunaan frasa "terus memperkuat operasi terpadu" dan "memastikan penanganan karhutla" membangun citra tindakan yang aktif dan terkoordinasi. Namun, citra positif tersebut terutama berkaitan dengan cara pemerintah digambarkan dalam menjalankan tugasnya. Citra positif dalam pemberitaan tidak secara otomatis membuktikan keberhasilan ekologis dari tindakan tersebut. Penilaian terhadap keberhasilan ekologis memerlukan bukti tambahan mengenai efektivitas pengendalian kebakaran, pengurangan kerusakan, atau pemulihan lingkungan

Identity

Identitas masyarakat dalam pemberitaan dibentuk melalui dua posisi, yaitu sebagai pihak yang perlu diingatkan mengenai larangan pembakaran dan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pengendalian Karhutla. Perbedaan tersebut terlihat dalam konstruksi "masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" dan "Manggala Agni bersama masyarakat [...] terus bekerja mengendalikan api". Dengan demikian, masyarakat tidak direpresentasikan secara tunggal, melainkan sebagai kelompok yang memiliki kemungkinan peran berbeda dalam persoalan Karhutla.

Sementara itu, identitas pemerintah dibangun melalui representasi sebagai institusi yang aktif memantau titik panas, memperkuat operasi, mengoordinasikan penanganan, dan menegakkan hukum. Penyebutan Menteri Kehutanan dan Manggala Agni turut menghubungkan tindakan penanganan dengan pejabat serta institusi tertentu. Pola tersebut membangun identitas kelembagaan sebagai pelaksana pengendalian Karhutla. Akan tetapi, identitas sebagai pengendali kebakaran perlu dibedakan dari penilaian atas hasil perlindungan lingkungan yang dicapai.

Ideology

Pola representasi yang berulang memperlihatkan kecenderungan wacana yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan Karhutla, sedangkan masyarakat direpresentasikan sebagai pihak yang perlu mematuhi arahan sekaligus dapat berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran. Kecenderungan ini terlihat dari penggunaan verba aktif yang dilekatkan pada pemerintah, seperti "memantau", "memperkuat", "memastikan", dan "menindaklanjuti", serta konstruksi yang menempatkan masyarakat sebagai penerima tindakan "mengingatkan".

Pola tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan wacana yang berorientasi pada kelembagaan dan penguatan peran pemerintah. Namun, penyebutan ideologi pro-pemerintah perlu dibatasi pada penonjolan agensi pemerintah dan pembentukan citra positif terhadap respons kelembagaannya. Data yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh wacana secara ideologis mendukung pemerintah atau bahwa penonjolan tersebut selalu bertentangan dengan kepentingan ekologis. Pemberitaan yang menonjolkan tindakan pemerintah dapat sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan, tetapi penilaian terhadap keberpihakan ekologisnya harus mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, keenam kategori tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan Karhutla membangun cerita ekologis yang berpusat pada keterlibatan masyarakat, kewenangan pemerintah, dan tindakan pengendalian kebakaran. Cerita ini memiliki aspek yang mendukung perlindungan lingkungan, terutama melalui penonjolan pencegahan pembakaran, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Namun, perhatian yang lebih terbatas terhadap kondisi ekosistem dan dampak ekologis jangka panjang menunjukkan bahwa representasi tindakan penanganan belum dapat diperlakukan sebagai bukti yang cukup mengenai keberhasilan ekologis. Oleh karena itu, penilaian terhadap wacana perlu membedakan antara cara aktor direpresentasikan, nilai yang dibangun melalui pilihan bahasa, dan bukti mengenai konsekuensi ekologis tindakan yang diberitakan.

Interpretasi terhadap temuan penelitian ini perlu mempertimbangkan konteks produksi wacana dan cakupan korpus yang dianalisis. Penelitian ini mengkaji representasi aktor sosial dalam delapan berita mengenai Karhutla Kalimantan yang diterbitkan melalui website resmi Kementerian Kehutanan pada 19–25 Agustus 2026. Fokus pada sumber kelembagaan tersebut memungkinkan identifikasi pola representasi masyarakat dan pemerintah dalam

wacana resmi mengenai pengendalian Karhutla. Namun, karakteristik sumber dan keterbatasan periode pengamatan perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan serta menentukan cakupan keberlakuannya.

Karakteristik sumber tersebut juga perlu diperhatikan ketika menafsirkan penonjolan aktor pemerintah. Sebagai institusi yang memiliki fungsi pengendalian Karhutla sekaligus memproduksi informasi resmi mengenai penanganannya, Kementerian Kehutanan memiliki kepentingan kelembagaan dalam menjelaskan tindakan, koordinasi, dan kebijakan yang dilakukan. Oleh karena itu, dominasi verba aktif yang dilekatkan pada pemerintah dapat menunjukkan cara institusi membangun representasi mengenai responsnya terhadap Karhutla. Akan tetapi, pola tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa seluruh pemberitaan bersifat pro-pemerintah atau bahwa tindakan yang diberitakan telah menghasilkan dampak ekologis yang positif. Penilaian terhadap dampak tersebut membutuhkan pembandingan dengan data mengenai kondisi lingkungan, hasil pengendalian kebakaran, serta pemulihan wilayah terdampak.

Temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian Ekayani et al. (2016), yang menunjukkan bahwa pemberitaan kebakaran hutan berkaitan dengan pembentukan wacana dan agenda kebijakan. Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada pentingnya pemberitaan dalam membentuk pemahaman publik mengenai persoalan kebakaran hutan. Namun, penelitian ini memperluas pembahasan dengan mengidentifikasi pola representasi masyarakat dan pemerintah melalui frekuensi, konkordansi, dan kolokasi dalam korpus berita kelembagaan. Dengan demikian, analisis tidak hanya mempertimbangkan hubungan pemberitaan dengan agenda kebijakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pilihan bahasa menempatkan aktor sosial dalam cerita mengenai pengendalian Karhutla.

Perbandingan dengan Suhandano et al. (2025) juga memperlihatkan relevansi pendekatan *corpus-assisted ecolinguistics* dalam mengungkap perbedaan penekanan wacana lingkungan. Penelitian tersebut membahas pemberitaan kabut asap lintas batas di media Indonesia dan Malaysia, termasuk representasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada satu sumber kelembagaan, yakni website Kementerian Kehutanan. Perbedaan cakupan tersebut memungkinkan penelitian ini menjelaskan secara lebih khusus bagaimana pemerintah sebagai produsen berita merepresentasikan tindakan kelembagaannya sendiri dan bagaimana masyarakat ditempatkan dalam wacana pengendalian Karhutla. Namun, karena tidak terdapat sumber pembanding, penelitian ini belum dapat memastikan apakah pola tersebut khas media pemerintah atau juga ditemukan dalam pemberitaan dari sumber lain.

Selanjutnya, temuan penelitian ini berhubungan dengan Amin dan Shehzad (2026), yang dalam tinjauan pustaka telah diperkenalkan sebagai penelitian mengenai representasi penyebab kebakaran, masyarakat, dan pemerintah dalam pemberitaan kebakaran hutan. Kesamaan fokus tersebut terletak pada perhatian terhadap konstruksi aktor dan tanggung jawab dalam wacana lingkungan. Penelitian ini memberikan penekanan tambahan pada ambivalensi representasi masyarakat: masyarakat ditampilkan sebagai pihak yang perlu diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tetapi juga sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran. Pemerintah, sebaliknya, lebih sering ditampilkan melalui tindakan pemantauan, koordinasi, pengendalian, dan penegakan hukum. Pola tersebut menunjukkan bahwa representasi tanggung jawab dalam berita tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dikaitkan dengan penyebab kebakaran, tetapi juga dengan siapa yang memperoleh agensi dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis representasi aktor sosial berbasis korpus dengan interpretasi

ekolinguistik terhadap berita resmi pemerintah. Analisis memperlihatkan bahwa penonjolan tindakan pemerintah dan pelibatan masyarakat membentuk cerita mengenai tanggung jawab sosial serta pengendalian kelembagaan. Namun, keterbatasan sumber dan periode pengumpulan data membuat temuan ini perlu dipahami sebagai karakteristik wacana dalam korpus yang diteliti, bukan gambaran menyeluruh mengenai pemberitaan Karhutla di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas korpus dengan membandingkan media pemerintah, media nasional, dan media lokal serta menghubungkan pola bahasa dengan data dampak ekologis agar hubungan antara representasi wacana dan kondisi lingkungan dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Wacana Karhutla di Kalimantan pada website resmi Kementerian Kehutanan dibangun dengan menonjolkan 2 aktor dominan, yaitu masyarakat dan pemerintah. Masyarakat direpresentasikan secara ambivalen, yaitu melalui *activation* sebagai aktor yang terlibat dalam pemadaman Karhutla dan melalui *passivation* sebagai aktor yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah direpresentasikan secara positif melalui *dual activation* sebagai aktor pengendalian kebakaran sekaligus pihak yang berwenang menyelidiki penyebabnya. Perspektif ekolinguistik menunjukkan bahwa wacana menekankan tanggung jawab manusia dan peran kelembagaan, tetapi belum cukup menggambarkan kondisi ekosistem serta dampak ekologis jangka panjang. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi wacana ekolinguistik berita Karhutla Kalimantan pada media lokal, nasional, dan internasional.

REFERENSI

Alexander, R., & Stibbe, A. (2014). From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse. *Language Sciences, 41*, 104–110. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2013.08.011

Amin, T., & Shehzad, W. (2026). Ecolinguistic analysis of the blame game in Los Angeles wildfire reporting. *Language Sciences, 115*, 101780. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2025.101780

Baker, P. (2006). *Using corpora in discourse analysis*. A&C Black.

Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. Dalam G. J. Cizek (Ed.), *Handbook of educational policy* (hlm. 455–472). Academic Press. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012174698850045X

Ekayani, M., Nurrochmat, D. R., & Darusman, D. (2016). The role of scientists in forest fire media discourse and its potential influence for policy-agenda setting in Indonesia. *Forest Policy and Economics, 68*, 22–29. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.01.001

Isti'anah, A., & Suhandano, S. (2022). Appraisal patterns used on the Kalimantan tourism website: An ecolinguistics perspective. *Cogent Arts & Humanities, 9*(1), 2146928. https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2146928

Jabeen, I. (2024). The portrayal of environmental concerns: An ecolinguistic analysis of media discourse. *World Journal of English Language, 14*(5), 13. https://doi.org/10.5430/wjel.v14n5p13

Kementerian Kehutanan. (2026). *12.880 personel gabungan tangani Karhutla di Kalimantan, Kemenhut perkuat Operasi Manggala Agni*. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://www.kehutanan.go.id/news/12-880-personel-gabungan-tangani-karhutla-di-kalimantan-kemenhut-perkuat-operasi-manggala-agni

McEnery, T., & Hardie, A. (2011). *Corpus linguistics: Method, theory and practice*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395

Meka, R. S., & Sabardila, A. (2025). Representasi Ibu Kota Nusantara dalam pemberitaan Detik.com: Analisis wacana kritis berbasis korpus. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 21*(2), 385–410.

Negrine, R. (2003). *Politics and the mass media in Britain*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203359808

Rambe, N. F. S., Nasution, A. K., Anggini, P., & Zafira, P. A. (2026). Wacana ekolinguistik dalam pemberitaan bencana alam berbasis eksploitasi alam di media massa. *7*(1), 4053–4060.

Stibbe, A. (2015). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by*. Routledge.

Stibbe, A. (2021). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by* (2nd ed.). Routledge.

Suhandano, S., Isti'anah, A., Suryani, D. S., Aziz, R. A., Abas, N., Ariffin, K., & Ahmad, B. E. (2025). Transboundary haze in Indonesian and Malaysian news media: Corpus-assisted ecolinguistics. *Studies in English Language and Education, 12*(3), 1546–1564. https://doi.org/10.24815/siele.v12i3.40570

van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. Dalam C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Ed.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (hlm. 32–70). Routledge.

van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.

Wardani, A., & Suprayitno, D. (2026). Analisis framing Entman dalam pemberitaan Karhutla pada Kompas.com dan CNNIndonesia.com tahun 2026. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5*(2), 1195–1209.

Wodak, R., & van Leeuwen, T. (2002). Discourses of un/employment in Europe: The Austrian case. *Text – Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 22*(3). https://doi.org/10.1515/text.2002.014